

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 101/KMK.05/1997

TENTANG

PEMBERITAHUAN PABEAN

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa guna pemenuhan Kewajiban Pabean yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan, diperlukan Pemberitahuan Pabean ;
- b. bahwa untuk kemudahan dan tertib administrasi dipandang perlu untuk menetapkan ketentuan tentang bentuk, isi, dan penanganan Pemberitahuan Pabean dengan Keputusan Menteri Keuangan.
- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983](#) tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000](#) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984);
2. [Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983](#) tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000](#) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985);
3. [Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983](#) tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000](#) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3986);
4. [Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995](#) tentang Kepabeanaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612);
5. [Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995](#) tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613);
6. [Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1996](#) tentang Tempat Penimbunan Berikat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3638) sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1997](#) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3717) ;
7. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor [339/KMK.05/1996](#) tentang Gudang Berikat;
8. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 488/KMK.05/1996 tentang Tatalaksana Kepabeanaan di Bidang Ekspor ;
9. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : [490/KMK.05/1996](#) tentang Tatalaksana Impor Barang Penumpang, Awak Sarana Pengangkut, Pelintas Batas, Kiriman Pos dan Kiriman melalui Perusahaan Jasa Titipan ;
10. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor [573/KMK.05/1996](#) tentang Tempat Penimbunan Sementara ;
11. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor [574/KMK.05/1996](#) tentang Tatalaksana Impor Sementara ;
12. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor [575/KMK.05/1996](#) tentang Tatalaksana Pengangkutan terus atau Pengangkutan Lanjut Barang Impor atau Ekspor ;
13. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor [701/KMK.05/1996](#) tentang Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanaan ;
14. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor [25/KMK.05/1997](#) tentang Tatalaksana Kepabeanaan Di Bidang Impor.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERITAHUAN PABEAN.

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan Pemberitahuan Pabean adalah pernyataan yang dibuat oleh orang dalam rangka melaksanakan Kewajiban Pabean dalam bentuk dan syarat yang ditetapkan dalam keputusan ini.

Pasal 2

Pemberitahuan Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dapat berupa :

- a. tulisan diatas formulir, atau
- b. pesan elektronik (electronic message).

#### Pasal 3

Pemberitahuan Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 meliputi :

- a. Pemberitahuan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut (BC 1.0) ;
- b. Pemberitahuan Kedatangan/Keberangkatan Sarana Pengangkut (BC 1.1) ;
- c. Pemberitahuan Barang Impor yang Diangkut Lanjut (BC 1.2) ;
- d. Pemberitahuan Pengangkutan Barang Asal Daerah Pabean Dari Satu Tempat Ke Tempat Lain Melalui Luar Daerah Pabean (BC 1.3) ;
- e. Pemberitahuan Impor Barang (B 2.1) ;
- f. Pemberitahuan Impor Barang Tertentu (BC 2.1) ;
- g. Pemberitahuan Impor Barang Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut (BC 2.2) ;
- h. Pemberitahuan Pengangkutan Barang Impor/Ekspor Dari Satu Tempat Ke Tempat Lain Dalam Pengawasan Pabean (BC 2.3) ;
- i. Pemberitahuan Ekspor Barang (BC 3.0) ;
- j. Pemberitahuan Ekspor Barang tertentu (BC 3.1) ;
- k. Pemberitahuan Pemasukan Barang Asal Daerah Pabean Ke Kawasan Berikat (BC 4.0).

#### Pasal 4

Bentuk formulir, isi, dan tatacara pengisian Pemberitahuan Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diatur sebagaimana tersebut dalam Lampiran I sampai dengan XI keputusan ini.

#### Pasal 5

Bentuk, isi, dan tatacara penyampaian Pemberitahuan Pabean berupa pesan elektronik diatur tersendiri.

#### Pasal 6

- (1) Pemberitahuan Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus diisi secara lengkap dan benar dengan menggunakan Bahasa Indonesia, huruf latin, dan angka arab.
- (2) Dokumen yang berlaku secara internasional yang berfungsi sebagai pemberitahuan Pabean, dapat diisi dengan menggunakan Bahasa Asing sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Konvensi Internasional yang bersangkutan.

#### Pasal 7

Dengan berlakunya keputusan ini, semua ketentuan tentang Pemberitahuan Pabean yang telah ada dan bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 8

Ketentuan teknis lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan ketentuan dalam keputusan ini diatur oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai.

#### Pasal 9

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1997

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 10 Maret 1997

MENTERI KEUANGAN,

MARIE MUHAMMAD